

LAPORAN KEMAJUAN TIMOR TIMUR

Pebruari 2000



**Pemerintahan Transisi PBB
di Timor Timur**

Kantor Komunikasi dan Informasi Umum
Bukan dokumen resmi. Hanya sebatas informasi.

Isi Kerangka

- Pendahuluan1
- Situasi Kemanusiaan3
 - ✓ *Kembalinya Pengungsi*
 - ✓ *Distribusi Pangan*
 - ✓ *Penghunian*
- Sarana dan Prasaran.....4
 - ✓ *Listrik*
 - ✓ *Air Minum*
 - ✓ *Perhubungan*
 - ✓ *Telekomunikasi*
- Pelayanan Sosial5
 - ✓ *Pendidikan*
 - ✓ *Kesehatan*
- Pembangunan Kelembagaan.....6
 - ✓ *Administrasi Umum*
 - ✓ *Pengontrol Perbatasan*
- Pembangunan Perekonomian7
 - ✓ *Pekerjaan*
 - ✓ *Keuangan*
 - ✓ *Sektor Swasta*
 - ✓ *Proyek Penguasaan Komunitas*
 - ✓ *Pertanian*
- Pelaksanaan Hukum
& Ketertiban8
 - ✓ *Peradilan*
 - ✓ *Polisi Sipil PBB*
 - ✓ *Langkah langsung demi menegakkan hukum dan ketertiban*
 - ✓ *Langkah langsung demi menegakkan hukum dan ketertiban*
- Hak Asasi Manusia10
- Perdamaian dan Keamanan.....11
 - ✓ *Situasi Keamanan*
 - ✓ *Pasukan Perdamaian UNTAET*
 - ✓ *Pengamat Militer PBB*

PENDAHULUAN

Lebih dari 78% pemilih rakyat Timor Timur memilih opsi kemerdekaan dalam jajak pendapat yang diadakan oleh PBB pada tanggal 30 Agustus 1999. Pengumuman hasil pemilihan diikuti oleh kampanye kekerasan dan pengrusakan yang menyeluruh yang dijalankan oleh milisi-milisi pro-integrasi.

Kira-kira 750,000 orang rakyat –dari jumlah total penduduk sebelum jajak pendapat, yaitu, 880,000 – menjadi pengungsi atau melarikan diri atau dipaksa menyeberang ke Timor Barat. Selain rumah-rumahnya, kekayaan dan uang simpanan kebanyakan rakyat Timor Timur juga terhilang.

Pasukan Internasional untuk Timor Timur (INTERFET), yang diberikan mandat oleh Dewan Keamanan PBB, mulai menempatkan pasukannya pada tanggal 20 September 1999 dan menegakkan kembali keamanan bagi rakyat Timor Timur.

Sebulan sesudahnya, pada tanggal 25 Oktober 1999, Dewan Keamanan PBB, membentuk Pemerintahan Transisi PBB di Timor Timur (UNTAET) berdasarkan Resolusi Nomor 1272.

Misi ini dimandatkan menegakkan keamanan, hukum dan ketertiban diseluruh wilayah Timor Timur; membentuk administrasi pemerintahan yang efektif; membantu mengembangkan pelayanan sipil dan sosial; menjamin koordinasi dan pengiriman bantuan kemanusiaan; memberikan bantuan rehabilitasi dan pembangunan; mendukung pengembangan kapasitas pemerintahan swasembada; membantu mencipta keadaan baik untuk pembangunan yang berkesinambungan.

Setelah kekerasan dan pengrusakan sesudah jajak pendapat, rakyat Timor Timur kekurangan makanan, pelayanan kesehatan dasar, air minum dan kebersihan. Pengaruh negatif dari gegolak sosial dan ekonomi ini memang sangat besar. Tidak heran, ada indikasi bahwa tingkat kriminalitas dan ketidakpuasan sedang meningkat selama beberapa bulan baru ini. Walaupun peningkatan ini berakar pada kekurangan pekerjaan dimana banyak pemuda-pemudi tidak bekerja, ada indikasi bahwa pertikaian dan konflik lama juga mulai muncul kembali, dilihat dari kekerasan diantara komunitas-komunitas dan gang-gang preman.

Konperensi donator untuk Timor Timur diadakan di Tokyo pada tanggal 17 Desember 1999. PBB, Bank Dunia dan Jepang bersama-sama mensponsori konperensi tersebut. Sejumlah US\$ 522.45 juta telah dijanjikan: US\$ 148.98 juta untuk kegiatan kemanusiaan dan US\$ 373.47 juta untuk administrasi pemerintahan sipil, rekonstruksi dan pembangunan. Lebih dari US\$ 31 juta dialokasi untuk Dana Perwalian PBB untuk membiayai administrasi pemerintahan sipil. US\$ 147 juta dialokasi untuk Dana Perwalian WB untuk menjamin transisi lancar dari bantuan kemanusiaan ke bantuan pembangunan.

Rencana enam bulan yang diminta oleh Donator di Konperensi Tokyo telah dirumuskan dan diajukan kepada Rapat Donator di Washington, DC pada akhir bulan Januari.

Namun, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Timor Timur, Sergio Vieira de Mello, menegaskan walaupun Bank Dunia merasa bahwa semuanya sangat mendesak, proyek pembangunan dan prasarana yang akan dibiayai oleh Dana Perwalian Bank

Dunia tidak dapat dilaksanakan dalam waktu beberapa bulan saja.

“UNTAET menghadapi suatu celah waktu yang dapat mengakibatkan suatu persepsi diantara rakyat Timor Timur selama beberapa bulan yang akan datang bahwa hanya ada kemajuan perbaikan prasarana sedikit saja, kecuali fasilitas PBB sendiri, yang dapat dibiayai dengan sumbangan yang telah disediakan.

“Oleh karena itu, memang sangat diperlukan pengeluaran alokasi Dana Perwalian Bank Dunia yang cepat, kelincihan penggunaan dana yang disediakan dan kontribusi bilateral yang kelimpahan, agar menghindari kegejolakan sosial.” katanya Sergio Vieira de Mello.

<u><i>TUJUAN JANGKA PENDEK UNTAET</i></u>	
<ul style="list-style-type: none">• Menjamin keamanan jasmani rakyat Timor Timur dan akses bagi mereka pada sistem peradilan yang adil dalam lingkungan yang menegakkan hukum dan ketertiban.• Mendukung UNHCR dalam tugasnya mengembalikan para pengungsi dan memberikan sumber bahan yang diperlukan untuk tempat penghunian, kesehatan dan kebersihan selama diintegrasikan kembali.• Membentuk pelayanan sipil dan administrasi pokok pada tingkat pusat dan daerah.◆ Menguasai pejabat Timor Timur pada setiap tingkat supaya mereka dapat berperan penuh dalam mengambil keputusan-keputusan dan mengimplementasikannya melalui struktur administrasi pemerintahan.	<ul style="list-style-type: none">• Menguasai pejabat Timor Timur pada setiap tingkat supaya mereka dapat berperan penuh dalam mengambil keputusan-keputusan dan mengimplementasikannya melalui struktur administrasi pemerintahan.• Memperbaiki pelayanan kesehatan, sistem pendidikan dan prasarana pokok, seperti listrik dan air minum.• Menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan ekonomi dan pertanian, jika struktur peraturan, fiskal dan keuangan telah dibentuk.• Memulai pengumpulan dasar penghasilan untuk menjamin kesinambungan pemerintahan transisi.• Menyusun, mengkategorikan dan memelihara bukti-bukti pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi di Timor Timur.

KEADAAN KEMANUSIAAN

□ *Kembalinya Pengungsi-pengungsi*

Pada akhir minggu pertama bulan Pebruari, operasi kemanusiaan di Timor Timur telah memudahkan kembalinya lebih dari 134,000 pengungsi dari Timor Barat dan membantu lebih dari 400,000 pengungsi didalam Timor Timur pulang ke rumah asalnya. Selama bulan Desember 1999 dan bulan Januari 2000 tingkat kembalinya pengungsi dari Timor Barat telah menurun. Alasan-alasan penurunan ini memang banyak dan rumit, termasuk intimidasi milisi-milisi, penyebaran keterangan palsu tentang situasi di Timor Timur dan keprihatinan para pengungsi mengenai kerusakan prasarana dan kekurangan pelayanan sosial pokok di Timor Timur.

Ada juga pengungsi-pengungsi, kebanyakannya bekas pegawai negeri Pemerintah Indonesia, atau mereka yang mempromosikan opsi pro-integrasi, yang telah meminta jaminan atas keamanannya, kemungkinan dan keuntungan memperoleh pekerjaan dalam administrasi pemerintahan transisi Timor Timur yang baru. Telah terjadi beberapa insiden dimana pengungsi-pengungsi yang diduga pro-otonomi diserangi dan rumahnya dibakar hangus. Namun, mayoritas orang pro-otonomi diintegrasikan kembali kedalam komunitasnya secara damai.

□ *Distribusi Pangan*

Lebih dari 15,000 ton metrik pangan telah didistribusikan diantara tanggal 20 September 1999 dan akhir bulan Januari 2000 oleh berbagai agen bantuan kemanusiaan dibawah naungan World Food Program (Program Pangan Sedunia). Kira-kira 10 kilogram pangan diberikan kepada setiap penerima pangan. Sasaran dari program ini adalah seluruh penduduk Timor Timur pada

unumnya. Pada bulan Nopember saja, 600,000 penduduk telah menerima bantuan pangan.

Pada akhir bulan Januari, sasaran program pangan dirubah dengan fokusnya pada kelompok-kelompok yang lemah, program “bekerja untuk pangan” dan program “Pangan untuk anak sekolah”. Perubahan ini dilaksanakan untuk mengurangi ketergantungan rakyat pada bantuan pangan dan untuk menghindari penghambatan pengembangan pasar-pasar di Timor Timur.

Penting dicatat disini bahwa distribusi umum akan terus dilaksanakan di desa-desa dimana, karena lokasinya yang terperinci dan jalan-jalannya rusak, penduduk-penduduknya belum menerima pangan dari program yang diadakan sebelumnya.

Orang-orang, yang karena alasan-alasan lain, tidak mempunyai akses kepada program pangan, juga termasuk kelompok-kelompok yang lemah.

Orang-orang cacad, ibu hamil dan menyusui, orang jompo, anak piatu, anak jalanan dan pasien-pasien rumah sakit secara tradisional dianggap sebagai kelompok-kelompok yang lemah.

Konsep program bekerja untuk pangan adalah memberikan kesempatan dan insentif kepada rakyat yang bekerja dalam program pengembangan komunitas. Ada beberapa macam pekerjaan seperti pelayanan umum, membangun kembali prasarana dan rumah yang dirusakkan, pelayanan pembersihan, membangun kembali prasarana pertanian dan fasilitas produksi pangan yang lain, seperti kolam ikan, bendungan dan tanggul. Jatah pangan yang diberikan dalam program ini adalah 3 kilogram beras atau jagung per orang per hari.

Sasaran program pangan untuk anak sekolah adalah untuk menjamin pasokan makanan untuk semua anak sekolah setiap hari.

□ *Rumah*

Kira-kira 175,000 rakyat Timor Timur akan menikmati bantuan dari program perbaikan rumah yang dijalankan oleh UNHCR. Sasaran program “perlengkapan untuk membangun (kit) rumah” yang akan dilaksanakan berkat bantuan dari delapan agen bantuan kemanusiaan internasional, adalah mendistribusikan 35,000 kit rumah kepada rakyat yang akan membangun kembali rumahnya sendiri.

Sampai akhir bulan Maret, sejumlah 28,000 ton bahan bangunan rumah akan tiba di Timor Timur. Daerah Oecussi, dimana agen bantuan memperkirakan lebih dari 80 persen bangunan dihancurkan, kapal angkatan laut AS digunakan untuk mendistribusikan bahan bangunan rumah untuk membangun kembali 1,000 rumah.

Selain program rumah UNHCR, CARE telah membantu membangun kembali lebih dari 400 rumah di daerah Covalima, dan bahan untuk membangun 60 rumah lagi akan tiba pada bulan Pebruari. ICRC telah membangun atau membangun kembali 1,100 rumah di daerah Bobonaro, Ermera, Aileu, Liquica dan Dili.

PRASARANA

□ *Listrik*

Pembangkit listrik solar adalah sumber primer tenaga listrik di Timor Timur. Sebelum bulan September 1999 telah ada 61 pusat pembangkit listrik di wilayah yang mencakupi suplai listrik kepada semua daerah perkotaan, namun

mayoritas daerah pedesaan tidak menikmati pelayanan tenaga listrik.

Pada permulaan bulan Februari, suplai listrik telah mengalir kepada semua pusat kota, tetapi masih ada gangguan di Maliana, Suai, Baucau, Same, Lospalos dan Liquica, akibatnya kerusakan mesin pembangkit atau gangguan pasokan bahan bakar. Dua puluh lima persen wilayah Timor Timur sudah menerima tenaga listrik, atau kira-kira 50 persen total penduduk Timor Timur.

Negara Australia dan Inggris membantu menjamin suplai tenaga listrik di Dili selama ini.

□ *Air Minum*

Sesudah melakukan perbaikan darurat, suplai air minum telah berfungsi di 13 daerah. Di Liquica, Maliana dan Suai, Oxfam International yang mengerjakan proyek rehabilitasi sistim-sistim air minum. Action Contre La Faim juga ikut merehabilitasi sistim air minum di Manatuto dan segera akan mulai perbaikan berat di Ermera. Bekerjasama erat dengan Oxfam, UNICEF (Dana Anak-anak PBB) telah menyediakan fasilitas air minum pada pusat penerimaan pengungsi-pengungsi. UNICEF mengorganisir perbaikan 900 pompa air tangan untuk 3,000 keluarga di desa-desa sekitar Dili.

□ *Perhubungan*

Bandar Udara Dili kini sudah buka untuk penerbangan sipil. Perusahaan Australia sudah menjalankan penerbangan komersial antara Dili dan Darwin. Perusahaan penerbangan Indonesia merencanakan memulai kembali penerbangan dari Indonesia ke Dili pada akhir bulan Pebruari.

INTERFET sedang memperbaiki jalan-jalan di rute dibagian utara laut barat

wilayah Timor Timur. Proyek perbaikan jalan sedang dilaksanakan oleh UNDP di Ermera. Ada juga proyek perbaikan jalan yang diadakan di Suai sejak bulan Desember. Nanti akan ada proyek perbaikan jalan di daerah Aileu, Baucau dan Viqueque.

Dua perusahaan pelayaran komersial sedang mengerjakan proyek peningkatan kapasitas pelabuhan Dili. Prasarana pokok pelabuhan akan dioperasikan kembali sesudah lalu lintas berat yang diakibatkan transisi dari INTERFET ke Pasukan Perdamaian PBB telah menurun. Suatu strategi sedang dirumuskan tentang cara yang terbaik untuk pengelolaan pelabuhan dibawah wewenang orang-orang sipil.

□ **Telekomunikasi**

International Telecommunications Union (Persatuan Telekomunikasi Internasional) telah menyetujui kode negara (670) untuk Timor Timur. Proses memperkenalkan kode ini kepada pusat telekomunikasi setiap negara akan memperlambat penggunaannya. Namun, Administrator Pemerintahan Transisi PBB akan menunda pemakaiannya. Pada bulan November, beliau telah menandatangani perjanjian kontrak selama 90-hari (dengan kemungkinan diperpanjang selama 90 hari lagi) dengan perusahaan telekomunikasi Australia untuk menjalankan jasa telekomunikasi selular di Dili dan sebagian daerah Baucau dan Suai. Di Dili, ada saluran telekomunikasi biasa yang berfungsi. Sementara, Jasa Pos Portugal (CTT) mengatur jasa pos di Timor Timur.

PELAYANAN SOSIAL

□ **Pendidikan**

Lebih dari 100,000 anak sekolah berumur sekolah SD sampai SMP/SMA

sedang bersekolah pada 600 sekolah pada 13 daerah Timor Timur. Kira-kira 4,300 guru menerima jatah makanan dan uang imbalan dari WFP dan UNICEF.

1,000 guru lagi akan mulai mengajar sampai akhir bulan Juli, setelah menyelesaikan kursus letihan yang diorganisir oleh UNTAET dan UNICEF. Kurikulum sekolah yang sedang digunakan (sejak penguasaan pemerintah Indonesia) sedang direvisi dan akan dijadikan dasar untuk mengembangkan kurikulum nasional Timor Timur.

Program pelatihan pekerjaan, pekerja konstruksi, montir, ahli listrik dan pekerjaan-pekerjaan yang lain sedang disiapkan berkat bantuan sebuah universitas di Australia.

Kongres nasional guru Timor Timur direncanakan pada bulan Mei tahun ini, dengan tujuan menyusun pernyataan misi tentang pendidikan.

□ **Kesehatan**

Sampai sekarang, 52 fasilitas medis dan 52 klinik mobil telah dibuka, untuk melayani setiap daerah di Timor Timur. Program anti-TBC, yang diorganisir oleh UNTAET WHO dan Caritas, sedang dilaksanakan di Dili, Baucau dan Lospalos. Sampai akhir tahun ini, program tersebut akan dilaksanakan di semua daerah Timor Timur.

Sekitar 90,000 klambu dibagikan oleh UNICEF dan *International Rescue Committee* untuk menghindari penularan penyakit malaria. UNICEF melakukan program penyuntikan penyakit campak tingkat nasional untuk anak-anak. Program penyuntikan untuk anak-anak pengungsi yang sudah pulang, program pengamatan penyakit dan immunisasi dan program pembasmian penyakit malaria sedang dilaksanakan dalam tingkat nasional.

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Dewan Penasehat Nasional (NCC) Timor Timur dibentuk sebagai wadah utama dimana wakil-wakil Timor Timur dapat terlibat dalam proses mengambil keputusan selama pemerintahan transisi (Peraturan Nomor 1999/2 tertanggal 2 Desember 1999). NCC terdiri dari 15 anggota: tujuh wakil dari CNRT; satu wakil dari Gereja Katolik; tiga wakil dari partai politik pro-otonomi.

Barisan Rakyat Timor Timur (BRTT) dan Partai Nasionalis Timor (PNT) sudah mewakili partainya di NCC dan wakil dari Forum Persatuan Demokrasi dan Keadilan (FPDK) sedang dirundingkan.

UNTAET memiliki 4 kursi dalam NCC, termasuk Administrator Pemerintahan Transisi, yang juga bertindak sebagai Ketua Dewan. NCC telah menciptakan panitia sektoral. Anggota-anggotanya terdiri dari ahli Timor Timur dan ahli internasional yang akan memberikan nasehat tentang beberapa bidang. Dua panitia sektoral sudah mengadakan rapat: satunya tentang ekonomi-makro dan keuangan; dan yang lain tentang administrasi pemerintahan. Panitia-panitia tentang administrasi lokal, prasarana, pertanian, kesehatan dan pendidikan sedang dibentuk. Sampai akhir bulan Januari, NCC telah mengadakan lima sidang. Keputusan Dewan, yang diambil secara konsensus dilaksanakan melalui 11 Peraturan yang dikeluarkan oleh Administrator Pemerintahan Transisi.

Peraturan-peraturan ini telah mendirikan lembaga-lembaga berikut:

- Dewan Penasehat Nasional (NCC)
- Komisi Transisi Pelayanan Peradilan
- Pusat Kewewenangan Fiskal

- Kantor Pusat Pembayaran
- Komisi Pelayanan Umum

Administrator Pemerintahan Transisi juga mengeluarkan Peraturan yang menjelaskan wewenang UNTAET, menentukan mata uang resmi Timor Timur, mendirikan Lembaran Negara Timor Timur, mengatur penggunaan mata uang di Timor Timur, menjelaskan prosedur perizinan biro penukaran mata uang, dan mengatur pendaftaran perusahaan.

□ *Administrasi Umum*

Unsur-unsur pokok administrasi umum diharapkan akan terwujud pada akhir bulan Pebruari, dan pada waktu itu, suatu administrasi sipil yang professional sudah akan mulai berfungsi.

Di tingkat lokal, sistim administrasi daerah sudah dibentuk dengan penempatan administrator daerah dan pendirian Dewan Daerah sebagai wadah dimana orang-orang Timor Timur dapat terlibat dalam proses mengambil keputusan di tingkat daerah. UNTAET akan mempunyai wakil sampai di tingkat kecamatan.

□ *Pengawasan Perbatasan*

Jasa Pengawasan Perbatasan Timor Timur yang baru telah dibentuk pada tanggal 29 Januari 2000 dan akan menangani fungsi imigrasi dan bea cukai. Pada saat itu, Jasa Pengawasan Perbatasan mengambilalih fungsi imigrasi dan bea cukai di Bandar Udara Comoro dari Polisi Sipil UNTAET. Satu minggu sesudahnya, pada tanggal 5 Pebruari 2000, Jasa Pengawasan Perbatasan yang baru mengambilalih fungsi yang sama di Pelabuhan Dili. Sampai akhir bulan Pebruari, dua pos perbatasan diantara Timor Timur dan Timor Barat dan satu pos di perbatasan Oecussi akan didirikan.

Tiga puluh pejabat orang Timor Timur direkrut oleh Jasa Pengawasan Perbatasan pada akhir bulan Januari dan diharapkan lebih dari 100 pejabat akan dipekerjakan sampai akhir bulan Februari.

Mereka bekerjasama dengan lima pejabat bea cukai dari Selandia Baru yang sekaligus memberikan pelatihan. Negara Amerika Serikat, Australia dan Portugal juga telah berjanjinya mengirim ahli-ahli untuk membantu Jasa Pengawasan Perbatasan.

PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN

□ Pekerjaan

Kurangnya bidang pekerjaan masih merupakan keprihatinan besar. Diperkirakan bahwa sekitar 80 persen total penduduk tidak mempunyai sumber pendapatan. Bank Dunia memperkirakan bahwa 50 persen penduduk buta huruf, dan sangat perlu dijalankan program skala besar untuk menyediakan pelatihan pekerjaan dan pendidikan untuk rakyat umum.

Komisi Pelayanan Umum dibentuk pada tanggal 21 Januari untuk mengawasi pilihan dan perekrutan pegawai negeri Timor Timur. Struktur administrasi pemerintahan, jumlah departemen, jumlah total pegawai dan skala gaji sedang dirundingkan, tetapi diduga bahwa 7,000 pegawai akan dipekerjakan dalam tahun ini.

Menunggu keputusan tentang hal-hal ini, sementara uang imbalan sedang dibayar kepada orang-orang Timor Timur yang sekarang berfungsi sebagai pegawai negeri secara sukarela. Uang imbalan pertama kali dibayar kepada 100 orang di Dili pada tanggal 31 Januari dan 1

Pebruari 2000. Pembayaran uang imbalan di daerah-daerah akan mulai pada tanggal 14 Februari.

Pada permulaan bulan Pebruari, UNTAET memperkerjakan sekitar 670 staf lokal. 1,900 orang Timor Timur akan direkrut dan bekerja dalam misi UNTAET.

Sementara, agen-agen kemanusiaan memperkerjakan paling banyak orang di Timor Timur, yaitu, lebih dari 3,000 orang, banyak diantara mereka bekerja di sektor profesional.

UNTAET sedang meluncurkan Proyek Kilat di daerah-daerah yang rusak berat agar dapat mengerjakan rakyat dalam program rehabilitasi komunitasnya. Administrator Daerah diperintahkan untuk memperkerjakan orang-orang untuk pekerjaan proyek masyarakat sementara. Orang-orang ini akan dibayar uang imbalan yang jumlahnya akan disetujui oleh NCC. UNDP sudah memulai proyek-proyek skala kecil untuk rehabilitasi jalan-jalan. Proyek-proyek ini dapat memperkerjakan ratusan orang. Proyek sama sedang dijalankan di Ermera dan proyek-proyek lain akan mulai selama bulan Februari di Aileu, Baucau dan Viqueque.

□ Sektor Swasta

Meskipun pendapatan dari pajak langsung dan bea masuk belum mulai ditagih, perusahaan-perusahaan sudah diperintah mendaftarkan diri dengan UNTAET. Mereka diberitahukan bahwa operasinya akan dikenakan pajak, sesuai yang ditentukan, secara retrospektif. Kebanyakan perusahaan besar yang sekarang aktif di Timor Timur dioperasikan oleh orang asing. UNTAET, bekerjasama dengan Bank Dunia, sedang mengidentifikasi proyek-proyek bisnis yang layak dan yang dimiliki orang Timor Timur untuk menawarkan kredit-mikro.

Lebih dari 500 perusahaan swasta sudah memohon sertifikat pendaftaran dari Departemen Urusan Keuangan, Pembangunan dan Ekonomi UNTAET. Pada permulaan bulan Pebruari, sekitar 200 perusahaan telah menerima sertifikatnya.

□ *Keuangan*

Sesudah disetujui oleh NCC, Administrator Pemerintahan Transisi menandatangani Peraturan yang menentukan mata uang dolar AS sebagai mata uang resmi Timor Timur. Ada Peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan pada bulan Januari yang membentuk Pusat Kewewenangan Fiskal, Kantor Pusat Pembayaran dan yang mengatur biro penukaran mata uang.

Sampai sekarang, dua bank sudah membuka cabang kantornya di Dili, yaitu, Banco Ultramarino dari Portugal dan Westpac dari Australia.

□ *Proyek Penguasaan Komunitas*

Proyek Penguasaan Komunitas yang didanai oleh Bank Dunia sekarang sedang dirundingkan. Nilai pendanaan proyek ini adalah \$US 20 juta selama 30 bulan. Proyek ini akan memberikan uang bantuan sebesar US\$ 15,000 – 100,000 kepada Dewan Daerah yang ditunjuk secara khusus. Dewan-dewan ini akan berhak mengambil keputusan tentang alokasi dana tersebut kepada desa-desa. Dana ini akan digunakan untuk membiayai berbagai macam proyek pembangunan komunitas sesuai keputusan Dewan Daerah.

□ *Pertanian*

Sejak mandat UNTAET, 400 ton metrik biji jagung dan 100 ton metrik tanaman polong sudah dibagikan pada permulaan musim tanam. Di daerah-daerah dimana

potensi produksi tinggi (Maliana, Baucau, Viqueque, Manatuto, Suai dan Same) proyek-proyek dikembangkan agar mesin traktor dibagikan kepada para petani. Didukung oleh program pelatihan, proyek-proyek ini bermaksud meningkatkan produksi padi dan mengembangkan produksi tanaman pangan skala besar, seperti jagung dan sayur-mayur. Sebagai bagian dari program restorasi peternakan ayam, ayam akan dibagikan juga. Situasi peternakan lainnya sedang dinilai.

PENEGAKAN HUKUM DAN KETERTIBAN

□ *Pengadilan*

Komisi Transisi Pelayanan Pengadilan didirikan pada tanggal 5 Januari. Komisi telah menunjukkan 10 hakim dan jaksa umum dan mempekerjakan enam pembela umum dari antara 20 orang Timor Timur yang berpartisipasi dalam program pelatihan pengadilan pada bulan Desember. Hakim dan jaksa umum yang pertama dilantik pada tanggal 7 Januari dan dua lagi diajukan untuk ditunjuk dan ada 30 calon lagi yang pada tanggal 22 Pebruari 2000 dapat kesempatan untuk ditunjukkan karena mereka telah menyelesaikan pelatihan. Dengan penunjukan kelompok hakim dan jaksa umum, pengadilan perkara dan pengadilan daerah akan dapat mulai beroperasi pada akhir bulan Pebruari.

Ditengah bulan Januari, INTERFET menyerahkan fungsi-fungsi penangkapan dan penjaraan kepada Polisi Sipil UNTAET dan Pengadilan Timor Timur. Sekarang, ada satu fasilitas penjara di Timor Timur, yaitu, Pusat Penjara Sipil. Pada permulaan bulan Pebruari, ada 45 orang yang ditahan dan kapasitas fasilitas sudah terpakai penuh.

UNTAET sudah siap mendanai dan melaksanakan perbaikan fasilitas penjara Becora yang berkapasitas 300 orang. Tahap pertama perbaikan akan memungkinkan penyerahan orang yang ditahan di penjara sekarang. Nanti jika perbaikan sudah diselesaikan, orang tahanan yang telah dihukum dan yang belum dihukum akan ditahan di blok sel yang terpisah.

Empat-puluh Pejabat Polisi Sipil UNTAET menangani tugas-tugas penjaran. Sudah beberapa kali, UNTAET memohon bantuan dari negara anggota PBB untuk mengirim pejabat penjara supaya Polisi Sipil UNTAET menjadi bebas untuk menjalankan tugas utamanya, yaitu, menegakkan hukum. Negara Jerman dan Selandia Baru telah menyatakan komitemennya menyediakan pejabat-pejabat penjara ini, dan hal ini juga dirundingkan dengan negara Amerika Serikat dan Portugal.

□ *Polisi Sipil UNTAET*

Sampai tanggal 9 Pebruari, 483 Polisi Sipil UNTAET telah ditempatkan di 13 daerah Timor Timur. Pos polisi tingkat kecamatan sedang disiapkan diseluruh wilayah Timor Timur. Pendetangan pejabat baru direncanakan sehingga jumlah total Polisi Sipil UNTAET akan mencapai 632 orang pada tanggal 15 Pebruari. Sebuah Satuan Reaksi Cepat yang terdiri dari 240 polisi akan mulai ditempatkan pada bulan Maret.

Sampai tanggal 3 Pebruari, 900 Polisi Sipil dijanjikan akan menjadi Polisi Sipil UNTAET, walaupun jumlah total yang ditentukan adalah 1,640 Polisi Sipil. PBB sudah berulang kali memohon kepada anggota negaranya supaya menambah pejabat polisi.

□ *Langkah-langkah Langsung Menegakkan Hukum dan Ketertiban*

Tingkat kriminalitas telah meningkat di Timor Timur selama dua bulan baru-baru ini. Sesudah beberapa insiden kekerasan pada akhir bulan Desember dan Januari, Polisi Sipil UNTAET telah melaksanakan beberapa langkah untuk menjamin tingkat penegakan hukum dan ketertiban yang memadai.

Walaupun jumlah Polisi Sipil UNTAET sekarang kurang daripada yang ditentukan, Polisi Sipil UNTAET sudah meningkatkan kehadirannya di beberapa tempat rawan di Dili dan telah mendirikan pos pemeriksaan untuk mencari senjata-senjata. Polisi Sipil UNTAET diperintah menyita langsung senjata-senjata yang dibawa oleh orang sipil tanpa alasan baik. Pada saat insiden di Dili pada pertengahan bulan Pebruari, lebih dari 60 pisau, parang dan batang besi disita.

Pada tanggal 10 Pebruari, Polisi Sipil UNTAET memutuskan mulai proses pengeluaran senjata pistol kepada pejabat polisi secara kasus demi kasus. Senjata pistol tersebut hanya dapat digunakan dalam kasus ancaman langsung hidup anggota Polisi Sipil atau pihak ketiga. Proses pengeluaran senjata juga termasuk ujian tambahan tentang pengertian akan kemampuan memakai senjata tersebut secara aman.

Sebagai tambahan, juga dikeluarkan perintah supaya anggota Polisi Sipil membawa baton yang dapat diperpanjang pada saat patroli.

Sekitar 200 mantan pejabat polisi Timor Timur diidentifikasi untuk menjadi calon polisi dan bekerjasama dengan Polisi Sipil UNTAET didalam Kelompok Bantuan Polisi.

Sesudah mengikuti seminar selama 3 hari, kelompok pertama yang terdiri dari 50 polisi akan ditempatkan diseluruh wilayah sampai akhir bulan Pebruari,

dan seluruh kelompok-kelompok akan ditempatkan sampai akhir bulan April.

Anggota-anggota Kelompok Bantuan Polisi akan memberikan bantuan dan nasehat kepada Polisi Sipil UNTAET tentang struktur komunitas dan budaya lokal berhubungan dengan penegakan hukum dan ketertiban, dan akan memberikan data inteligensi tentang kebiasaan perlakuan kriminal.

INTERFET masih terus memberikan dukungan penting dalam usaha menjamin tingkat penegakan hukum dan ketertiban yang memadai. INTERFET mengambil tindakan atas permohonan Polisi Sipil UNTAET memadamkan situasi di tempat-tempat insiden kegaduhan pada akhir bulan Desember dan bulan Januari. INTERFET menambah patrolinya di Dili dan Baucau berikut insiden-insiden kekerasan di daerah-daerah ini.

Pada tanggal 10 Pebruari, sekitar 539 Polisi Sipil UNTAET ditempatkan ke wilayah misi dari 29 negara, termasuk:

Amerika Serikat(42)	Muang Thai (2)
Argentina (15)	Nepal (9)
Australia (60)	Niger (21)
Austria (10)	Norwegia (1)
Bangladesh (9)	Pakistan (4)
Brazil (12)	Philippina (21)
Cina (15)	Portugal (43)
Federasi Rusia (3)	Selandia Baru (10)
Ghana (102)	Senegal (19)
Gambia (26)	Spanyol (3)
Inggeris (14)	Sri Lanka (29)
Jordania (16)	Swedia (10)
Kanada (13)	Zambia (1)
Malaysia (20)	Zimbabwe (5)
Mesir (4)	

Selain kegiatan utama, yaitu, menegakkan hukum dan ketertiban, Polisi Sipil UNTAET juga sedang sibuk membentuk kepolisian Timor Timur yang baru. Kira-kira 20,000 formulir

pelamaran untuk menjadi pejabat polisi sedang dibagikan keseluruh daerah Timor Timur. Nanti, pelamar akan bersaing mendapatkan 3,000 posisi jabatan dalam Kepolisian Timor Timur.

Pelatihan terdiri dari kursus latihan intensip diikuti oleh pelatihan dan pengawasan di lapangan. Kursus latihan akan diadakan di Akademi Kepolisian Timor Timur di Comoro. Kelas kursus pertama dihadiri oleh 40 polisi baru.

Selama kursus, calon polisi akan menerima pendidikan tentang hukum pidana, prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia, teknik-teknik kepolisian, peraturan lalu lintas, teknik-teknik penyelidikan dan mengendarai mobil. Calon yang lulus dari Akademi Kepolisian lalu mendampingi Polisi Sipil UNTAET di lapangan dan lama-lama akan menjadi pengantinya.

HAK-HAK ASASI MANUSIA

Jumlah persis korban dari kekerasan politik pada tahun 1999, huusnya penhancuran properti pribadi dan umum secara sistematik dan berskala-luas yang terjadi sesudah hasil jajak pendapat diumumkan pada tanggal 2 September masih belum diketahui. Sampai kini, lebih dari 300 mayat ditemukan diseluruh wilayah Timor Timur; lebih dari 100 mayat ditemukan di kuburan sementara dan masih ada ratusan tempat kuburan korban yang akan diperiksa sesudah musim hujan.

Tim tetap ahli forensik sudah dibentuk didalam Divisi Hak-hak Asasi Manusia UNTAET. Sekaran Tim terdiri dari tiga ahli forensik. Mereka akan bekerjasama berdasarkan secara bergiliran dengan ahli-ahli lain dari beberapa negara untuk jangka waktu yang terbatas. Tempat penyimpanan mayat dan fasilitas

forensik mulai beroperasi di Dili pada tanggal 24 Januari 2000.

UNTAET melayani beberapa misi penyelidikan pelanggaran hak-hak asasi manusia di Timor Timur. Misi pertama, dari tanggal 4 sampai 10 Nopember 1999, adalah pelapor khusus Komisi Hak-hak Asasi Manusia tentang pembunuhan secara massal, diluar hukum dan tidak beralasan, pelapor khusus tentang penyiksaan dan pelapor khusus tentang kekerasan terhadap wanita, termasuk alasan dan konsekwensinya.

Misi tersebut diikuti oleh Misi Komisi Penyelidikan Internasional untuk Timor Timur dari tanggal 25 Nopember – 8 Desember 1999. Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, mengajukan laporannya kepada Dewan Keamanan pada tanggal 31 Januari 1999.

Laporan tersebut menegaskan bahwa ditemukan “*model pelanggaran berat hak-hak asasi manusia dan pelanggaran hukum kemanusiaan... ditemukan juga model-model yang menunjukkan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan milisi-milisi dalam pelanggaran tersebut*”. Didalam surat yang mendampingi laporannya, Sekretaris Jenderal mengutamakan pentingnya rakyat Timor Timur dan menuntut bahwa pelaku-pelaku harus bertanggungjawab atas tindakannya. Untuk mencapai hal-hal tersebut, Beliau bermaksud “*menguatkan kapasitas UNTAET untuk melakukan penyelidikan dan bekerjasama diantara UNTAQET dan KPP-HAM*”.

UNTAET melayani dua kunjungan KPP-HAM ke Timor Timur. KPP-HAM ditunjukkan oleh KOMNASHAM. Ada juga kunjungan Tim Pengacara Perwira-perwira TNI yang dicurigai keterlibatannya dalam kekerasan pada bulan September.

PERDAMAIAN DAN KEAMANAN

□ *Situasi Keamanan*

Di hampir seluruh daerah-daerah Timor Timur, situasi keamanan dianggap sebagai “*risiko rendah*” oleh Pengamat Militer UNTAET (UNMO), kecuali di tiga daerah perbatasan, yaitu, Bobonaro, Covalima dan Oecussi. Di daerah perbatasan ini, tingkat ancaman dikategorikan “*beresiko sedang*”. UNMO memperkirakan bahwa masih ada kelompok inti sekitar 1,000 anggota milisi yang masih aktif di Timor Barat. UNMO melaporkan bahwa beberapa diantara mereka masih menerima pelatihan militer (khususnya di Atambua).

□ *Pasukan Perdamaian PBB*

Transisi dari misi INTERFET ke Pasukan Perdamaian PBB mulai pada tanggal 1 Pebruari dan akan diselesaikan pada tanggal 23 Pebruari 2000. Lt. Jend. Jaime de los Santos, dari Philipina, adalah Komandan Pasukan Perdamaian PBB. Mayor Jenderal Michael Smith, dari Australia, adalah Wakil Komandan. Kedua jenderal ini tiba di Dili pada tanggal 23 Januari 2000.

Kapasitas militer Pasukan Perdamaian PBB sama dengan kekuatan INTERFET dan mandatnya memang merupakan tantangan besar, dan kemampuan akan lebih daripada kesiapan berperang saja. Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB, Sergio Vieira de Mello, baru-baru ini menyatakan harapannya bahwa “*selama kita maju kedepan dalam penempatan satuan berperang di Timor Timur akan menurun dan kita dapat mulai menambah kapasitas untuk memberikan pelayanan kepada rakyat dan mendudung bidang lain seperti ilmu*

teknik mesin, logistik, jasa-jasa dan pengobatan."

Dua puluh tiga negara akan mengirim kira-kira 8,500 pasukan sebagai Pasukan Perdamaian PBB. Negara ini termasuk:		
Australia	Jordania	Pakistan
Bangladesh	Kanada	Portugal
Brazil	Kenya	Philippina
Chile	Mesir	R. Korea Selatan
Denmark	Muang Thai	Rusia
Fiji	Nepal	Selandia Baru
Irelandia	Norwegia	Singapura
Italia	Perancis	

Hampir 70 persen pasukan INTERFET akan menjadi Pasukan Perdamaian PBB dan akan tetap bertugas di daerah-daerah dengan posisi yang sama. Transisi ini memulai di bagian wilayah timur dan akan menyebar ke bagian barat.

Pasukan Perdamaian PBB diorganisir kedalam empat sektor, yaitu, bagian timur, tengah, barat dan Oecussi.

Seperti INTERFET, Pasukan Perdamaian PBB memiliki tujuh batalion. Sektor Timjur, dengan pusatnya di Baucau, memiliki tiga battalyun (Philipina, Korea Selatan dan Thailand yang menjadi pemimpinya). Sektor Tengah, dengan pusatnya di Dili, memiliki satu battlyun (Portugal), tambah satu kompi pasukan jalan (Kenya). Sektor Barat, dengan pusatnya di Suai, memiliki dua battalyun (Australia dan Selandia Baru, yang dipimpin oleh Australia). Daerah Oecussi memiliki satu battalyun (Yordania).

□ **Pengamat Militer PBB**

Kelompok Pengamat Militer PBB diberikan mandat untuk mengamati,

memonitor dan melaporkan tentang situasi di Timor Timur, termasuk juga kemajuan proses kantongisasi, penempatan senjata dan de-mobilisasi kelompok bersenjata. UNMO mempunyai empat tugas utama, yaitu: menjadi penghubung dengan TNI; memonitor perbatasan; menjadi penghubung dan mengatur Falintil dan menjadi penghubung dan pembantu Pasukan Perdamaian PBB dan Polisi Sipil UNTAET.

Oleh karena kenetralan mereka, UNMO juga diminta oleh penduduk untuk memecahkan dan mengatur macam-macam persoalan, termasuk reuni anggota-anggota keluarga pada perbatasan, yang telah dilakukan atas kerjasama INTERFET dengan TNI. UNMO memiliki 11 tim penghubung perbatasan pada tiga daerah perbatasan, yaitu, Bobonaro, Covalima dan Oecussi.

Pengamat Militer UNTAET melapor langsung kepada Komandan Pasukan Perdamaian PBB.

Sampai tanggal 24 Januari, 185 diantara pasukan yang ditentukan, yaitu, 201 Pengamat Militer dari 27 negara telah ditempatkan di Timor Timor:	
Australia (17)	Mesir (10)
Bangladesh (30)	Muang Thai (11)
Bolivia (2)	Nepal (5)
Brazilia (4)	Pakistan (30)
Denmark (2)	Philippina (20)
Inggeris (4)	Rusia (2)
Irelandia (3)	Selandia Baru (13)
Jordania (5)	Swedia (2)
Malaysia (20)	Uruguay (5)